

**PEMBERIAN KREDIT MODAL BERGULIR UNTUK  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT  
DI PROPINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

**Oleh :**

**SALMEK SARAGIH**

**NPM : 03 180 3012**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis  
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2005**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

**Oleh :**

**NAMA : SALMEK SARAGIH**

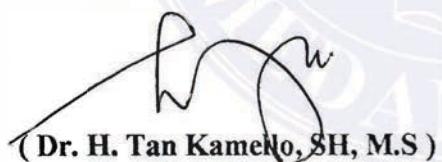
**N P M : 03 180 3012**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM BISNIS**

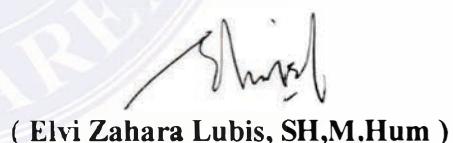
**JUDUL : PEMBERIAN KREDIT MODAL BERGULIR  
UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DALAM  
RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI  
RAKYAT DI PROPINSI SUMATERA**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

  
**(Dr. H. Tan KameNo, SH, M.S )**

**Pembimbing II**

  
**( Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum )**

**DIKETAHUI OLEH**

  
**Ketua Program Studi**  
  
**( Arif, SH, M.H )**

  
**Direktur**  
  
**( Drs. Heri Kusmanto, MA )**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Pengaji Tesis

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juni 2005

Tempat : Program Pascasarjana MHB-UMA

**TIM PENGUJI**

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, M.A

Sekretaris : Arif, SH,M.H

Pengaji I : Dr. H. Tan Kamello, SH,M.S

Pengaji II : Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum

Pengaji Tamu : Prof. Dr. H. Ediwarman, SH,M.Hum (.....)

## KATA PENGANTAR

Kasih karunia Tuhan serta anugerah setia Allah yang senantiasa membimbing dan menuntun serta menyertaiku dalam setiap langkahku sehingga dapat menyelesaikan tulisan tesis ini dengan judul : **Pemberian Kredit Modal Bergulir Untuk Koperasi dan Usaha Kecil Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Propinsi Sumatera Utara** sebagai akhir pada masa perkuliahan yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai gelar Magister Bidang Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat penulis ucapkan kepada-Mu ya Tuhan karena penus tidak punya arti apa-apa kecuali yang bersumber daripada-Mu.

Disamping semua itu penulisan tesis ini juga tidak akan berhasil tanpa, bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Tan Kamello, SH,MS sebagai pembimbing pertama dan Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum sebagai pembimbing kedua yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan telah membimbing penulis sejak awal penyusunan proposal tesis hingga penulisan tesis ini selesai.

Pada kesempatan ini juga saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian studi penulis yaitu kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Para Pengawali Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Utara.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area.

Selanjutnya tidak akan lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang dengan tulus selalu berdoa untuk restu dan memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini. Tidak kurang penghargaan juga kepada saudara-saudaraku, istriku dan anakku Dedy Saragih yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian studiku, dan teristimewa kepada sahabat-sahabatku di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Utara. Semoga Tuhan kiranya memberkati kita semua.

Harapan penulis semoga tesis ini memberi manfaat bukan hanya pada diri penulis tetapi juga kepada masyarakat khususnya masyarakat dibidang pendidikan hukum bisnis.

Medan, Juni 2005  
Penulis,

**Salmek Saragih**

## DAFTAR ISI

*Halaman*

### **HALAMAN JUDUL**

### **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **HALAMAN PENGESAHAN**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
-----------------------------	---

<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
-------------------------	-----

<b>ABSTRAK .....</b>	v
----------------------	---

<b>ABSTRAC .....</b>	vii
----------------------	-----

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
--------------------------------	---

1.1. Latar Belakang.....	1
--------------------------	---

1.2. Perumusan Masalah.....	5
-----------------------------	---

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian .....	5
---	---

1.4. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian .....	6
--	---

1.5. Kerangka Pemikiran .....	7
-------------------------------	---

<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	9
--	---

2.1. Pengertian Dan Prinsip Koperasi .....	9
--	---

2.2. Pengertian Usaha Kecil .....	17
-----------------------------------	----

2.3. Pengertian Dana Modal Bergulir .....	21
---	----

2.4. Pengertian Kredit .....	22
------------------------------	----

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	60
3.1. Sifat/Jenis Penelitian .....	60
3.2. Lokasi Penelitian .....	60
3.3. Populasi Dan Sample .....	61
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.5. Analisa Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	65
4.1. Hasil Penelitian .....	65
4.2. Pembahasan .....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	97
5.1. Kesimpulan .....	97
5.2. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	100
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **ABSTRAK**

Perekonomian Indonesia dibangun berdasarkan atas kekeluargaan dan usaha bersama dimana segala produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem perekonomian yang ideal bagi Indonesia harus didasarkan pada usaha bersama dari masyarakat yang secara keseluruhan, bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (dengan meningkatkan pendapatan perkapita) serta pembagian seimbang dari hasil yang berasal dari usaha bersama tersebut (pembagian pendapatan yang merata), dengan negara memainkan peranan aktif untuk menyerahkan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional adalah koperasi dan usaha kecil yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pengembangan usaha bagi koperasi dan usaha kecil setelah menerima dana bergulir yang disalurkan oleh pemerintah propinsi Sumatera Utara, prinsip-prinsip terciptanya iklim bisnis bagi koperasi dan usaha kecil telah mendapat dana bergulir di propinsi Sumatera Utara dan kendala dan hambatan yang sering terjadi dan dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dana bergulir bagi koperasi dan usaha kecil di propinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kwantitatif di dalam penelitian ini maka diambil suatu kesimpulan bahwa pemberian Kredit Modal Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil belum berjalan dengan harapan. Sehingga koperasi dalam usaha kecil di kota Medan belum masih belum mampu melaksanakan amanahnya yaitu mensejahterakan anggotanya. Faktor-faktor maupun prinsip-prinsip bisnis bagi koperasi dan usaha kecil di kota Medan belum berjalan dengan baik dimana hasil tinjauan di lapangan masih banyak koperasi dan pengusaha kecil yang tidak dapat mengerjakan pembukuan koperasi dan usaha kecil dengan baik dan benar. Hambatan-hambatan yang masih banyak dalam rangka pemberian kredit di kota Medan meliputi : kurangnya informasi tentang kredit bagi koperasi dan usaha kecil; sumber daya manusianya masih kurang memadai baik dikalangan pengusaha maupun birokrat; adanya bias sasaran karena sistemnya disusun berdasarkan asumsi pemberi kredit; bentuk sistem pengetahuan pelayanan kredit yang disediakan belum mampu melayani kelompok sasaran; antara pengusaha dan pemberi pelayanan masih adanya pemisah yang disebabkan panjangnya mata rantai yang harus dilalui dalam penyaluran kredit. Disamping itu beberapa skema maupun sistem pendanaan kredit yang diberikan tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu

sistem pemberian kredit bagi koperasi dan usaha kecil yang ada pada saat ini perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dari pihak pengusaha maupun koperasi; agar persyaratan maupun prosedur lebih dipermudah sehingga pengurus koperasi dan usaha kecil dapat lebih akses dalam penerimaan kredit tersebut; suku bunga agar diturunkan untuk meningkatkan kinerjanya; perlu adanya sistem kredit yang fleksibel yang mampu dan mudah dijangkau, penyebaran informasi yang lebih aktif kepada koperasi dan pengusaha kecil melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun konsultasi yang dilakukan demi terciptanya pemberdayaan ekonomi rakyat di Sumatera Utara khususnya di kota Medan dan sekitarnya.



## **ABSTRACT**

The national economy of Indonesia was founded based on familial relationship and in cooperation where every production shall be handled by all for all members under the leader or bases to ownership of society. The national economy shall be held bases to the economy with an equality principle, efficiency, justice, sustainable, environmental insight, autonomy and it should keep balance of the progress and unity of national economy. An ideal economy system for Indonesia should be based on a jointly work of those society in whole, aims to improve the living standard of the society (by rising income per capita) and with a balance share for the wealthy derived obtained from the cooperation with joint work (equal share of income), means the state play an active role to deliver and conduct the economy development. One of pillars in the development of national economy is cooperation and small-scale business aiming to develop the people welfare and for local development in generally, this is to support how keeping the society in welfare and have justice based Pancasila and Undang-Undang Dasar 1945. In connecting with it, there are found some problems emerged in the development of business for cooperation and small-scale business following received a roll-on fund on North Sumatra Province and the inhibiting occurring found and sometime that should be faced in implementing delivery credit with a roll-on system fund to those cooperative and small-scale business on North Sumatra Province. To this study adopted a quantitative descriptive method and then taken a conclusion that presenting a roll-on Capital credit for Cooperation and small-scale business do not run as expected. So the cooperation in a small-scale business found in Medan still not capable to perform as require, namely to keep the society as member welfare. The factors and business principles for cooperation and small-scale business in Medan city operation ru not well yet where according to the field survey found many cooperatives and small-scale entrepreneur could not run well and ideal. The inhibiting factors found mainly for presenting the capital fund covers : shortage information about the credit for cooperative and small-scale business; human resources still lack either seen from the capability and knowledge point of view on the business itself; found deviation of target away the from the system arranged based on the assumption only for having credit; the system for sharing information require for credit prepared is not to serve the group as target; between the businessman and giver services found a separator seen according to the longer chain involved for delivery the fund as credit for them. In addition, still found several schemes or system for funding of credit given is not suitable to the society requirement. Therefore, there required a special system for the

presenting credit to those cooperatives and small-scale business available at present, there perhaps require simplification and there should be referred to the condition as fact, found from the businessman or cooperative. For the requirements or procedure should be taken easier, so the management of cooperatives and small-scale business can take as many as possible access in having some credit; still the interest bank there should be taken lower for increasing the performance; perhaps require a credit system practiced flexible and capable and easy to achieve, either in spreading the information should be done more actively and to those cooperatives and small-scale business through an education activity, also with training and offering consultation it all should be done for creating a people economy encouragement to this region of North Sumatra Province of Medan and surroundings.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha bersama dimana segala produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sistem perekonomian yang ideal bagi Indonesia harus didasarkan pada usaha bersama dari masyarakat yang secara keseluruhan, bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (dengan meningkatkan pendapatan perkapita) serta pembagian seimbang dari hasil yang berasal dari usaha bersama tersebut (pembagian pendapatan yang merata), dengan negara memainkan peranan aktif untuk menyerahkan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal inilah yang disebut dengan pembangunan ekonomi kerakyatan.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi rakyat adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan pemerintah terhadap sebuah tatanan ekonomi dari sejumlah usaha kecil dengan berorientasi usaha masih sekitar pemenuhan kebutuhan pokok saja yang dikelola oleh rakyat dengan modal dan akumulasinya terbatas, teknologi

---

<sup>1</sup> Priyono Tjiptoherijanto, 1997, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 135

dan manajemennya tradisional, padat karya dan output produksi yang diperuntukkan bagi rakyat juga.

Salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional adalah koperasi dan usaha kecil yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi adalah wadah pembinaan kesetiakawanan dan kebersamaan yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi memegang peranan penting dalam melakukan suatu kerjasama dan sama-sama bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi kehadiran dan peranan koperasi Indonesia didalam perekonomian nasional kita mempunyai dasar konstitusional yang kuat yakni Undang-Undang 1945 Pasal 33 serta penjelasannya.<sup>2</sup>

Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kewirausahaan yang berskala kecil memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan terdiri atas usaha kecil internal dan usaha kecil tradisional.<sup>3</sup>

Pembangunan koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional menghadapi beberapa kendala pembiayaan usaha dan permodalan, teknologi, manajemen usaha, kelayakan usaha, sistem pemasaran, maupun persaingan yang timbul dalam melaksanakan kegiatan usaha.

---

<sup>2</sup> Sagimun M.D., Koperasi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983 hal. 1-2.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

## DAFTAR PUSTAKA

### A. B u k u

Arifinal Chaniago, **Perekonomian Indonesia**, Angkasa, 1982.

Badrul Zaman, Mariam Darus, 1989, **Perjanjian Kredit Bank Alumni Bandung**.

\_\_\_\_\_, 1994, **Aneka Hukum Bisnis Alumni Bandung**.

Clarkkle, Philip, 1973, **Small Business, How The Survive and Sucsed David & Charles Limited Great Britain**, chapter 1 page 19, **A View of Small Business**.

Dirjen Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994, **Petunjuk Teknis dan Bimbingan Konsultasi Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil**, Jakarta.

Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, **Sebuah Pengantar Departemen Koperasi**, 1983.

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Departemen Dalam Negeri, 1999, **Pedoman Pos Ekonomi Rakyat**.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1989, **Kredit Rakyat di Masa Depresi**, LP3ES, Jakarta.

Fuady, Munir, 1996, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hans, H. Munkers (Alih Bahasa : Abdul Kadir Muhammad), **Hukum Koperasi**, Alumni Bandung, 1987.

Harsoyono Subyakto dan Bambang Tri Cahyono, **Ekonomi Koperasi**, Liberty, Yogyakarta, 1983.

Ibnu, Soedjoeno, **International Co-operative Aliance Jadi Diri Koperasi**, LSP2i, Jakarta, 2001.

Ima, Suwandi, **Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial**, Bharata Karya, Jakarta, 1985.

- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, **Koperasi dan Perekonomian Indonesia**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Prijono Tjiptoheri Janto, 1997, **Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi**, Rineka, Jakarta.
- Ristiani, Frida (Ed), 1996, **Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi**, AKATIGA – YAPIKA BANDUNG.
- R.T. Sutantya Raharja Hadhikusumo, **Hukum Koperasi Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Supraptomo Heru, **Segi-Segi Hukum Yang Berkaitan Dengan Penjelasan Kredit Macet, Diskusi Panel Antara Mahkamah Agung Dengan BPULN Tanggal 7-8 Maret 1996 di Medan**.
- Sutanto, Ny. Retno Wulan, **Upaya HukumPenagihan Kredit Macet dan Eksekusi Jaminan, Diskusi Panel Antara Mahkamah Agung Dengan BPULN Tanggal 7-8 Maret 1996 di Medan**.
- Sagimu, M.D., **Koperasi Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Thomas, Suryanto, dkk, 1997, **Dasar-Dasar Perkreditan**, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia** PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1995.
- Prof. DR. Soedjono Dirjosisworo, SH, MBA, **Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia**, Penerbit Mander Maju, 1997, Bandung.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tntang Usaha Kecil.

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/Kep/M. KUKM/II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro

Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Jakarta 2003 Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangan Dengan Penyediaan Modal Awal dan Pedoman (MAP) melalui KSP/USP Koperasi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP Koperasi dari Konpensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002.

